

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN REHAB RUMAH  
BAITUL MAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**JULIA SYANTIKA  
NIM. 190801041**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julia Syantika  
NIM : 190801041  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul skripsi: Analisis Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Baitul  
Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di  
Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
9F3AKX688909087

Julia Syantika

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN REHAB RUMAH  
BAITUL MAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan

Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

**JULIA SYANTIKA**

NIM. 190801041

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A**

NIP. 196407051996031001

  
**Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H**

ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN REHAB RUMAH BAITUL MAL  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

**Julia Syantika**

**NIM.190801041**

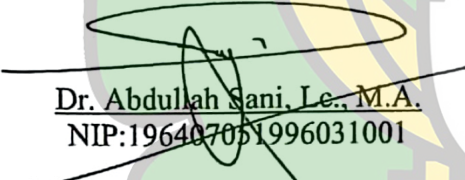
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023


1 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh,  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Abdullah Sani, Le., M.A.  
NIP:196407051996031001

  
Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H.

Penguji I,


Penguji II,

  
Rizkika Lhena Darwin, M.A.  
NIP:198812072018032001

  
Melly Masvi, M.I.R.  
NIP:199305242020122016

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Murni Mulia, M.Ag.  
NIP:197403271999031005

## ABSTRAK

Nama : Julia Syantika  
NIM : 190801041  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik  
Judul : Analisis Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan  
Tebal skripsi : 82 halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A  
Pembimbing II : Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan program penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah program bantuan rehab rumah. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya terutama dari segi kebutuhan papan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program rehab rumah Baitul Mal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis suatu kondisi sosial yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat penerima bantuan tetapi juga masyarakat disekitar lingkungan tersebut. Dampak yang dirasakan diantaranya: Peningkatan kemandirian ekonomi, ketahanan dan stabilitas, adanya lapangan pekerjaan, interaksi sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengurangi konflik, pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial dan peningkatan solidaritas sosial. Program rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam proses perencanaan dan penyaluran sudah bagus. Saran kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam penyaluran program bantuan rehab rumah untuk dapat menambah kuota penerima bantuan supaya lebih banyak masyarakat yang dapat terbantu dan merasakan dampak dari program bantuan rehab rumah.

**Kata Kunci:** *Baitul Mal, Program Rehab Rumah, Kesejahteraan Masyarakat*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, ridho, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan” untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan berkat dan Rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan salam sejahtera kepada Nabi besar Muhammad SAW.
2. Teristimewa kepada keluarga besar tercinta terutama kepada ayah, mama dan nenek yang telah mendidik, memotivasi, memberikan dukungan moril maupun materil serta memberikan doa kepada penulis. Kepada kakak-kakak dan adik serta abang ipar dan juga keponakan yang

telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik
6. Ramzi murziqin, M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik
7. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Penasehat Akademik
8. Dr. Abdullah sani, Lc., MA Selaku Pembimbing I penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu, serta memberikan arahan dan bimbingan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H Selaku Pembimbing II penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu, serta memberikan arahan dan bimbingan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan juga para tenaga

profesional yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk melakukan wawancara.

12. Keuchik Jambo Papeun dan masyarakat penerima bantuan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis.

13. Kepada sahabat-sahabat Faza, Monika, Ayu, Mawar, Ratna, Zahratul, Andra, Tiara, Fini yang memberikan semangat dan tawa serta tempat berkeluh kesah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019 yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dalam menghadapi susah senangnya revisian dan penelitian. Terimakasih untuk tetap kuat dan tangguh dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

معة الرانيري Penulis,

A R - R A N I R Y

**JULIA SYANTIKA**  
NIM. 190801041



## DAFTAR ISI

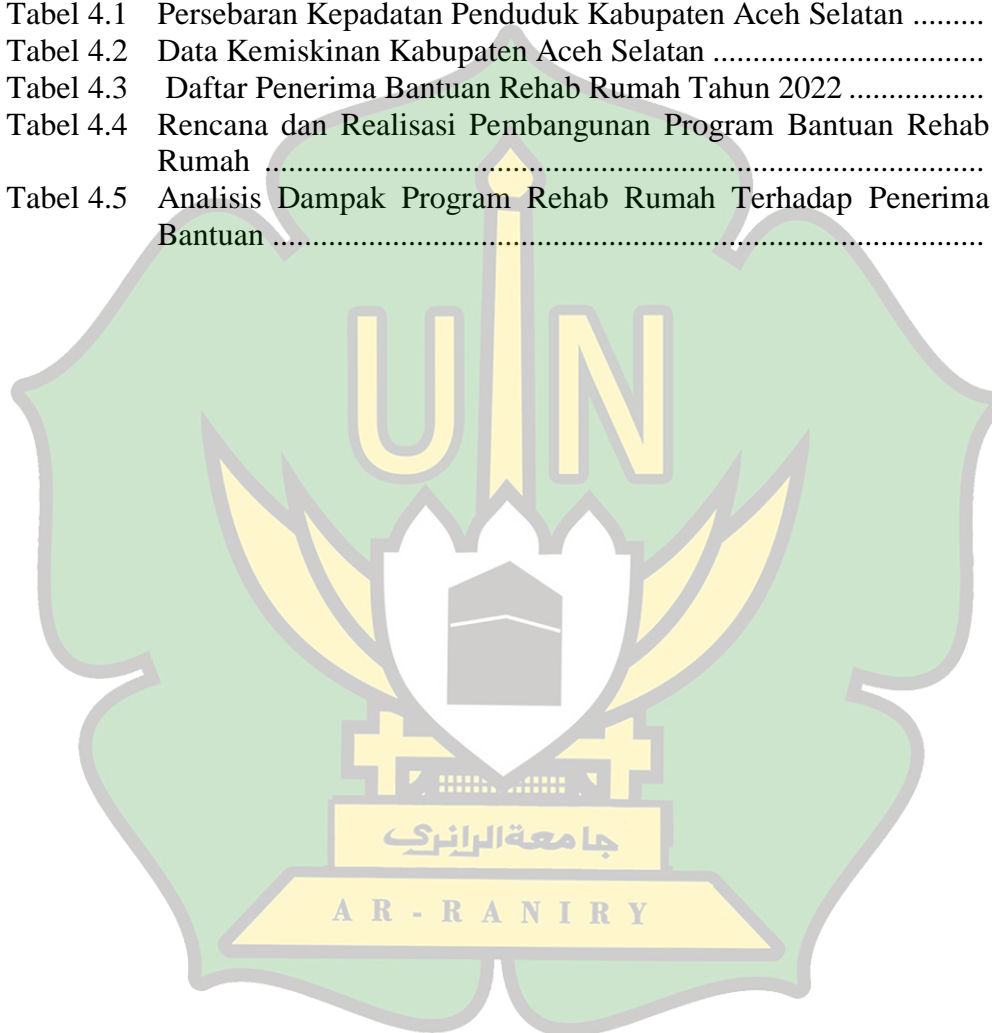
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5 Penjelasan Istilah.....	11
1.5.1 Analisis .....	11
1.5.2 Dampak.....	12
1.5.3 Kemiskinan .....	13
1.5.4 Kesejahteraan.....	14
1.5.5 Baitul Mal .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
2.2 Konsep Kemiskinan.....	24
2.2.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	27
2.2.2 Indikator Kemiskinan .....	29
2.3 Konsep Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	31
2.4 Teori Kesejahteraan Sosial .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian .....	37
3.3 Lokasi Penelitian .....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5 Informan Penelitian .....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6.1 Wawancara.....	40
3.6.2 Dokumentasi .....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan .....	45
4.2 Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan .....	49
4.2.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.....	50

4.2.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.....	52
4.2.3 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan .....	53
4.2.4 Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.....	54
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
4.3.1 Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.....	56
4.3.2 Proses Perencanaan Program Bantuan Rehab Rumah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan .....	62
4.3.3 Kendala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam Menyalurkan Program Bantuan Rehab Rumah.....	69
4.3.4 Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021-2022.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1	Informan Wawancara .....	39
Tabel 4.1	Persebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan .....	45
Tabel 4.2	Data Kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan .....	47
Tabel 4.3	Daftar Penerima Bantuan Rehab Rumah Tahun 2022 .....	56
Tabel 4.4	Rencana dan Realisasi Pembangunan Program Bantuan Rehab Rumah .....	65
Tabel 4.5	Analisis Dampak Program Rehab Rumah Terhadap Penerima Bantuan .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.....	51
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	88
Lampiran 2: Dokumentasi Penyaluran Program Rehab Rumah Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan .....	92
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian .....	95



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak adanya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Persoalan kemiskinan masyarakat tidak hanya ditandai dengan ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dikatakan kemiskinan bersifat multidimensional karena kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi dan sosial lainnya. Kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang ditandai dengan mayoritas masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas merupakan penyebab terjadinya kemiskinan. Disamping itu, ketidakmampuan dalam mengembangkan diri karena disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang

---

<sup>1</sup> Noor dan David, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)". *jurnal jibeka*, Vol. 11, No. 2, 2017.

berpengaruh pada sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni dan rendahnya mutu lingkungan permukiman. Kondisi yang serba keterbatasan menyebabkan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena faktor ekonomi.<sup>3</sup> Menurut BPS kondisi rumah yang dikatakan tidak layak huni apabila rumah dengan luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang dan jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu dengan kualitas yang rendah. Jenis dinding tempat tinggal dari rumbia, bambu atau kayu berkualitas rendah tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar dan tidak memiliki penerangan rumah atau tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi. Apabila terdapat kriteria tersebut, maka termasuk rumah tidak layak huni.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin Hak Asasi Manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan yang sama dimata hukum, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak lainnya. Dalam Undang-

---

<sup>2</sup> Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007), hlm. 24.

<sup>3</sup> BAPPENAS, *Perencanaan Pembangunan Nasional*, (Bappenas TA-SRPP: Jakarta, 2003), hlm. 53.

<sup>4</sup>Kriteria RTLH Menurut Lembaga/Instansi/Dinas Lainnya, diakses pada 07 Juli 2023 [Kriteria RTLH Menurut Beberapa Pihak - Page 3 of 3 - perkim.id](#)

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H menjelaskan bahwa pada pasal 1 terdapat salah satu substansi yang penting yaitu setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehat dan ramah lingkungan. Pasal 2 menjelaskan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang sama. Pasal 3 menjelaskan setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial dan pengembangan diri dan pasal 4 menjelaskan setiap orang memiliki hak pribadi dan tidak dapat diambil alih oleh siapapun.<sup>5</sup>

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menjelaskan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tanpa ada perilaku diskriminatif merupakan kewajiban negara. Peran pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Diperlukan peran masyarakat baik perseorangan, kelompok, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lainnya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang perumahan menjelaskan bahwa rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, diakses pada 10 Juni 2023 [UUD-1945.pdf \(bkn.go.id\)](https://www.bkn.go.id/unduh/1945/1945.pdf)

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, diakses pada 10 Juni 2023, tersedia [PENJELASAN \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/penjelasan)



aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.<sup>7</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi di Indonesia yaitu berada pada urutan keenam perprovinsi di Indonesia dan urutan pertama sesumatera dengan persentase 14,64% pada semester 1 (Maret).<sup>8</sup> Provinsi Aceh memiliki beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan strategi yang tepat dalam memberantas kemiskinan diperlukannya intervensi atau usaha dari pemerintah yang sesuai dengan prosedur, sasaran dan tujuannya yang dapat dibagi berdasarkan jangka waktunya yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.<sup>9</sup>

Upaya dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Baitul Mal Aceh Selatan telah melakukan program penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Persentase Penduduk Miskin Perprovinsi 2022

<sup>9</sup> Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.130.

salah satunya adalah program bantuan rehab rumah. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya terutama dari segi kebutuhan papan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam (pasal 1, ayat 11). Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta waqaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah, Baitul Mal telah banyak melakukan upaya atau program untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Baitul Mal hadir untuk meminimalisir masalah-masalah kemiskinan dan sosial masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kehadiran Baitul Mal diharapkan untuk menjawab berbagai persoalan sosial dan kemiskinan

---

<sup>10</sup> *Qanun Aceh No.3 Tahun 2021 Perubahan Atas Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal*, Diakses pada 28 Mei 2023 [Provinsi Aceh \(acehprov.go.id\)](http://acehprov.go.id)

masyarakat yang kurang mampu yang dapat diharapkan sebagai solusi penting terhadap ketidakadilan sosial. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan dalam pendistribusian zakat kepada masyarakat miskin.

Salah satu program penyaluran bantuan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh Selatan adalah program bantuan rehab rumah bagi masyarakat miskin. Dengan harapan bantuan ini dinilai mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peran Baitul Mal Aceh Selatan dalam menyalurkan bantuan rehab rumah kepada masyarakat miskin sangatlah penting, karena di Aceh Selatan masih rendah tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Mekanisme penyaluran program bantuan rehab rumah ini yang pertama dilakukan adalah setiap masyarakat golongan fakir miskin mengajukan proposal permohonan bantuan rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Selatan, proposal tersebut nantinya akan diverifikasi, baik itu verifikasi data maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kelayakan rumah yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh Selatan.

Program bantuan rehab rumah yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah dimulai sejak 2013. Tercatat hingga tahun 2022 total keseluruhan rumah yang telah di rehab sebanyak 465 unit. Penyaluran bantuan dari Baitul Mal Aceh Selatan diantaranya data rehab rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2022 sebanyak 58 Unit dengan nominal bantuan RTLH Rp. 30.000.000,-/unit, untuk rehab rumah ringan tahun 2022 sebanyak 16 Unit dengan nominal bantuan renovasi ringan Rp. 10.000.000,-/unit, dan sanitasi MCK tahun 2022 sebanyak 26 Unit

dengan nominal bantuan sanitasi MCK Rp. 10.000.000,-/unit. Dengan jumlah total bantuan untuk program rehab rumah sebesar Rp. 2.160.000.000,- yang bersumber dari dana ZIS 2022.<sup>11</sup>

Berikut data rumah tidak layak huni di kabupaten aceh Selatan tahun 2021-2022 yang diperoleh dari Diskominfo Aceh Selatan.<sup>12</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021-2022

Kecamatan	Kondisi Rumah tidak layak huni tahun 2021	Kondisi Rumah tidak layak huni tahun 2022
Trumon	171	190
Trumon Timur	357	348
Trumon Tengah	327	331
Bakongan	155	157
Bakongan Timur	200	203
Kota Bahagia	438	451
Kluet Selatan	281	284
Kluet Timur	416	388
Kluet Utara	764	836
Pasie Raja	345	305
Kluet Tengah	357	359
Tapaktuan	244	228
Samadua	248	235
Sawang	124	106
Meukek	351	276
Labuhan Haji	77	169

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Melalui Baitul Mal Menyerahkan Bantuan Rehab Rumah dan Fasilitas MCK kepada Mustahik, Diakses pada 28 Mei 2023 ([acehselatankab.go.id](http://acehselatankab.go.id))

<sup>12</sup> Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkecamatan Tahun 2021 (Satuan Unit), Open Data Aceh Selatan, Diakses pada 10 Juni 2023 ([Open Data Aceh Selatan \(acehselatankab.go.id\)](http://Open Data Aceh Selatan (acehselatankab.go.id)))

Labuhan Haji Timur	182	150
Labuhan Haji Barat	95	95
<b>Jumlah</b>	<b>5132</b>	<b>5111</b>

Sumber data: Open Data Aceh Selatan, Diskominfo Aceh Selatan 2021-2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa program bantuan rehab rumah mampu menurunkan angka jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Aceh Selatan meskipun penurunnya tidak terlalu signifikan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini terus meningkatkan pemberian program bantuan rehab rumah kepada masyarakat miskin demi memberikan dampak positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan.

Permasalahan yang muncul pada program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat yang disebabkan tidak meratanya pengalokasian jumlah bantuan di tiap-tiap gampong yang ada diwilayah Aceh Selatan. Padahal kondisi masyarakat sama-sama kurang mampu dan masyarakat memang betul-betul yang membutuhkan bantuan tersebut. Penyebabnya adalah adanya kepentingan politik, sering kali para pemangku jabatan mendahulukan kerabatnya ataupun pendukungnya sebagai penerima bantuan. Hal ini jelas adanya nepotisme dan klientilisme dalam pendistribusian program bantuan rehab rumah. Adanya pertimbangan politik yaitu para pemangku jabatan menginginkan di daerahnya bantuan harus dialokasikan bukan atas dasar kebutuhan sebenarnya. Sehingga ini dapat memicu kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menyalurkan bantuan rehab rumah kepada masyarakat miskin yang tentunya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan. Penulis tertarik untuk meneliti analisis dampak program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam penelitian ini juga mengkaji proses perencanaan dan penyaluran program bantuan rehab rumah serta strategi dan kendala dalam menyalurkan program bantuan rehab rumah yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perencanaan program bantuan rehab rumah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menyalurkan program bantuan rehab rumah ?
3. Bagaimana dampak program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perencanaan program bantuan rehab rumah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam menyalurkan program bantuan rehab rumah di Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik, baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan secara akademis bagi penulis, mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta pihak-pihak lain di bidang yang terkait. Terutama untuk mengetahui dampak program bantuan rehab rumah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi informasi yang berguna dalam memahami dan menjelaskan suatu permasalahan lain yang terkait dengan topik penelitian.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa dan masyarakat yang berguna dalam melihat dampak positif dari program bantuan rehab rumah Baitul Mal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan strategi dan model yang efektif untuk mensosialisasikan dan penyaluran program oleh Baitul Mal khususnya program bantuan rehab rumah.

## 1.5 Penjelasan Istilah

### 1.5.1 Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb). Menurut Dwi Prastowo analisis yaitu penguraian suatu pokok dari berbagai bagiannya, penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Nana Sudjana analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan

---

<sup>13</sup> Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta, 2019), hlm. 21.



susunannya.<sup>14</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan penelusuran atau penyelidikan yang terencana dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil dari apa yang ditelusuri. Analisis dapat dikatakan sebagai kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Beberapa unsur pokok dalam analisis yaitu:

1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui.
2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas.
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman sebuah objek kajian.

### 1.5.2 Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah pengaruh atau akibat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.<sup>15</sup> Dampak dapat diartikan sebagai sesuatu yang timbul karena adanya suatu peristiwa atau

---

<sup>14</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya 2016), hlm. 36.

<sup>15</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011)

pembangunan yang ada di dalam masyarakat yang menghasilkan perubahan baik itu yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup.

Dampak berarti benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Berdampak yaitu berbenturan, mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Dampak merupakan sesuatu yang bersifat objektif. Dampak biasanya sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian. Dampak terbagi kedalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu pengaruh yang menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, bersifat menguntungkan sedangkan dampak negatif bearti pengaruh yang menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk. Dampak dalam politik adalah akibat dari suatu keputusan, tindakan, ataupun peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat.

### **1.5.3 Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan

menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.<sup>16</sup>

#### 1.5.4 Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut BAPPENAS merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>18</sup>

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>19</sup>

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga

---

<sup>16</sup> Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm.65

<sup>17</sup> Bappenas-Indonesia, diakses Selasa, 30 Mei 2023.

<sup>18</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, diakses pada 10 Juni 2023, tersedia [UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial \[JDIH BPK RI\]](#)

<sup>19</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.24.

diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Negara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya melalui bantuan sosial, pelayanan sosial, perlindungan sosial serta pencegahan masalah-masalah sosial. Kesejahteraan umum sebagai tujuan negara bukan berarti kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak haknya sebagai warga negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

### **1.5.5 Baitul Mal**

Kata Baitul Mal berasal dari Bahasa Arab yaitu Bait yang berarti “rumah” dan al-Mal yang artinya “harta”. Jadi dapat disimpulkan Baitul Mal adalah rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan dan men-tasyaruf-kan dana sosial.<sup>20</sup> Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan

---

<sup>20</sup> Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoris Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.46

umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam (pasal 1 ayat 11).<sup>21</sup>

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal yang penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Bantuan Baitul Mal mempunyai berbagai program pembiayaan untuk masyarakat miskin termasuk didalamnya program bantuan rehab rumah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan meminimalisir pemukiman kumuh dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program bantuan rehab rumah di Baitul Mal Aceh Selatan sudah berjalan dari tahun 2013. Program ini merupakan program tahunan dengan sumber dana yang digunakan berasal dari infaq Baitul Mal Aceh Selatan. Program bantuan rehab rumah di peruntukkan untuk masyarakat kurang mampu yang ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni.

---

<sup>21</sup> *Sejarah singkat Baitul Mal*, Diakses pada 28 Mei 2023 tersedia [Sejarah Singkat | Baitul Mal Aceh Selatan \(acehselatankab.go.id\)](http://Sejarah Singkat | Baitul Mal Aceh Selatan (acehselatankab.go.id))

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang hampir memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini. Dengan penelitian terdahulu ini secara tidak langsung dapat membantu penulis dalam mengerjakan penelitian dengan terarah dan tersusun rapi. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Savira Tavniam dan Putu Martini Dewi (2020) dengan berjudul “Analisis Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rtm di Kecamatan Karangasem”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan bedah rumah di Kecamatan Karangasem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program bantuan bedah rumah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan serta masyarakat yang kurang mampu dari segi fasilitas rumah tangga dan juga fasilitas tempat tinggal.<sup>22</sup>

Kedua, penelitian oleh Rismaniar (2022) dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”. Hasil penelitiannya adalah pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mekanisme kegiatan penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin dalam menyalurkan bantuan sudah tepat sasaran. Program ini diperuntukan kepada fakir

---

<sup>22</sup> Savira dan Putu, *Analisis Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rtm Di Kecamatan Karangasem*, 2020

miskin, selain fakir miskin dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka Baitul mal tidak menyerahkan bantuan tersebut. Untuk pengajuan bantuan program ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Baitul Mal. Efektivitas dalam penyaluran program bantuan renovasi rumah fakir miskin yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah bagus. Untuk efektivitas tepat sasaran, harga, dan administrasi sudah tepat di lakukan Baitul Mal yang diukur dari beberapa indikator yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, administrasi, dan harga. Akan tetapi dari segi pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat; seperti tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat kualitas karena terdapat beberapa kendala dalam penyaluran rumah tersebut.<sup>23</sup>

Ketiga, penelitian oleh Tateki Yoga Tursilarini, dan Trilaksmi Udiati (2020) dengan judul “Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka”. Hasil penelitian menunjukkan Bantuan sosial Rutilahu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Bantuan rutilahu berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat juga dapat terpenuhi kebutuhan fisik rumah, psikis dan sosial. Dilihat dari aspek fisik, bantuan sosial Rutilahu dapat membantu memperbaiki rumah keluarga penerima manfaat dari atap, lantai, dan dinding hingga berada dalam kondisi baik, (94%). Dilihat dari aspek psikis, (98%) KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki keamanan dan kenyamanan rumah hingga berada dalam kondisi baik terbukti rumah dapat

---

<sup>23</sup> Rismaniar, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)*, 2022

melindungi anggota keluarga dari cuaca alam (panas matahari, hujan, dan angin) dan gangguan manusia seperti aman dari pencurian dan gangguan binatang buas, pembagian ruangan rumah menjadikan keluarga merasakan nyaman, dan betah tinggal di rumah. Dilihat dari aspek sosial, 98 persen KPM menyatakan bahwa bantuan sosial Rutilahu dapat memperbaiki komunikasi anggota keluarga, antar tetangga, gotong royong, kepedulian sosial, partisipasi, dan status sosial KPM termasuk kategori baik.<sup>24</sup>

Keempat, penelitian oleh Asriani (2021) yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Hasil penelitiannya dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah berjalan dengan baik yang mencakup tentang kebijakan, terkait informasi dan konsistensi telah dijalankan sesuai prosedur dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat khususnya penerima bantuan. Sumberdaya yang dimiliki baik dari sumber daya manusia, wewenang, informasi serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan program stimulan bedah rumah dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah memadai. Begitupun birokrasi yang dimiliki oleh program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah baik dan memiliki sistem yang jelas. Pelaksana program bantuan tersebut sudah menjalankan secara objektif dan taat kepada aturan akan tetapi pelaksana teknis maupun konsep harus menguasai prosedur, wewenang dan aturan agar dapat menjalankan program lebih baik lagi. Struktur birokrasi program

---

<sup>24</sup> Tateki dan Trilaksmi, *Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka*, 2020



bantuan stimulan bedah rumah sudah jelas dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidang dan amanah masing-masing sehingga setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri.<sup>25</sup>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Savira Tavniam dan Putu Martini Dewi, 2020, Analisis Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rtm Di Kecamatan Karangasem.	Kuantitatif komparatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan bedah rumah di Kecamatan Karangasem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan serta masyarakat yang kurang mampu dari segi fasilitas rumah tangga	Kajian penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang program bantuan rumah terhadap kesejahteraan masyarakat.	Dalam penelitian sebelumnya program bantuan bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat Rtm di Kecamatan Karangasem dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Sedangkan dalam penelitian peneliti program bantuan rehab rumah dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan.

<sup>25</sup>Asriani, *Implementasi Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu*, 2021

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dan juga fasilitas tempat tinggal.		
2.	Rismaniar,2022, Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitiannya adalah dalam mekanisme penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin pihak Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan sudah tepat sasaran. Untuk efektivitas tepat sasaran, harga, dan administrasi sudah tepat di lakukan Baitul Mal yang diukur dari beberapa indikator yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu,	Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang program bantuan rumah.	Perbedaanya adalah pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh). Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis dampak program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>kualitas, administrasi, dan harga. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dari segi pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat; seperti tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat kualitas.</p>		<p>masyarakat dengan menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat.</p>
3.	<p>Tateki Yoga Tursilarini dan Trilaksmi Udiati, 2020, Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga</p>	<p>Kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Bantuan sosial Rutilahu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Bagi keluarga penerima</p>	<p>Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang program bantuan rumah terhadap kesejahteraan.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya berada di</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka.		manfaat juga dapat terpenuhi kebutuhan fisik rumah, psikis dan sosial yang berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.		kabupaten Bangka sedangkan penelitian peneliti berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan
4.	Asriani, 2021, Implementasi Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.	Deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Hasil penelitiannya dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) sudah berjalan dengan baik yang mencakup tentang kebijakan, informasi dan konsistensi telah dijalankan sesuai prosedur dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat khususnya	Kajian penelitian sebelumnya juga membahas tentang program bantuan bedah rumah	Penelitian ini berfokus pada komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumberdaya terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR). Sedangkan judul

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penerima bantuan. Dari segi sumber daya manusia, wewenang, informasi serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan program stimulan bedah rumah sudah memadai. Begitupun birokrasi sudah memiliki sistem jelas.		penelitian peneliti berfokus pada dampak program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya ditandai dengan hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi banyak hal lain seperti: tingkat kesehatan, pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang

disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya.<sup>26</sup>

Dalam pandangan Chambers tentang definisi kemiskinan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi.<sup>27</sup> Pertama, kemiskinan (*proper*) yaitu permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula yakni kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan. Kedua ketidakberdayaan (*powerless*) yang ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Keempat, ketergantungan (*dependency*) dari keterbatasan kemampuan pendapatan dari individu atau kelompok yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Kelima, keterasingan (*isolation*) adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

---

<sup>26</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hlm.23

<sup>27</sup> Yulianto Kadji, *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, Artikel- Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, 7 November 2013

Dimensi kemiskinan terbagi dalam tiga aspek, yakni: (1) Aspek ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. (2) Aspek politik yaitu kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. (3) Aspek sosial-psikologis yaitu kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Menurut Chambers masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Berikut kriteria sebagai tolak ukur yang bersifat kualitatif atas ketidakberuntungan tersebut dengan beberapa ciri berikut ini : (1) Rumah tangga miskin hanya memiliki sedikit sekali harta kekayaan atau bahkan tidak punya sama sekali. Tempat tinggalnya berukuran sempit yang terbuat dari bambu, kayu, tanah liat dan perabotan yang dimiliki hanya sedikit. Rumahnya sering tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci dan kakus. Pola nafkah cenderung bertani pada lahan yang sempit. (2) Rumah tangga miskin tersisih dari arus kehidupan. Rumah tangga miskin di pedesaan pada umumnya bertempat tinggal di lokasi pinggiran dan terpencil jauh dari keramaian dan pusat informasi. Begitu juga di perkotaan, warga miskin menempati rumah tinggal yang berada di pemukiman padat. Akses terhadap fasilitas pendidikan rendah yang menyebabkan mereka putus sekolah. Warga miskin ini jarang bersedia aktif berpartisipasi dalam ragam pertemuan, rapat

maupun kegiatan sosial formal/non formal. (3) Rumah tangga miskin lemah jasmani. Beban tanggungan ekonomi yang harus dipikul kepala rumah tangga miskin cukup berat. Kehidupan setiap harinya dijalani dengan kepasrahan.

### 2.2.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi terbatasnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi kondisi ketidakberdayaan akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, rentan terhadap kejahatan atau kriminal dan resiko memperoleh perlakuan negatif secara politik serta yang paling utama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahterannya sendiri.

Kemiskinan sebagai masalah multidimensional memiliki 4 bentuk yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.<sup>28</sup>

#### a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi yang mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang mengakibatkan tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan dasar untuk dapat hidup secara layak. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Garis kemiskinan diartikan sebagai

---

<sup>28</sup> Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy, 2004).  
Hlm. 122



pengeluaran rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros, atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Dari keempat bentuk kemiskinan diatas, bentuk kemiskinan struktural yang paling banyak mendapat perhatian di bidang Ilmu Sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia.

Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, diantaranya:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terbentuknya karena adanya kelangkaan sumberdaya alam atau ketiadaan pra sarana umum seperti jalan raya, listrik dan air bersih dan keadaan tanah yang kurang subur. Biasanya daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan yang disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak memiliki akses untuk menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas secara merata. Kemiskinan buatan adalah salah satu dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara sedang berkembang.

### 2.2.2 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, dalam mengukur tingkat kemiskinan dari seseorang, yang dikatakan masyarakat miskin dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari apabila terdapat kriteria sebagai berikut:

### 1. Tempat tinggal

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang dan jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu dengan kualitas yang rendah. Jenis dinding tempat tinggal dari rumbia, bambu atau kayu berkualitas rendah tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar serta tidak memiliki penerangan rumah (tidak menggunakan listrik).

### 2. Pangan

Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi ataupun dari sungai atau air hujan. Untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

### 3. Sandang

Indikator kemiskinan seseorang dalam sandang adalah hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Maka hal ini merupakan kategori miskin.

### 4. Pendapatan

Adapun indikator kemiskinan bagian pendapatan yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga dengan pekerjaan: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan.

### 5. Tabungan

Tidak mempunyai tabungan atau barang yang mudah dijual kembali dengan minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

## 6. Pendidikan Terakhir

Indikator terakhir dari kemiskinan adalah pendidikan yang mana pendidikan terakhir kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah atau tidak lulus SD atau lulus SD.<sup>29</sup>

### 2.3 Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah bentuk keterlibatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara kesejahteraan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warganya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial..." Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 berbunyi: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan Masyarakat*, 2022

<sup>30</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (FH UII Press: Yogyakarta, 2012) hlm.14-

Berdasarkan undang undang diatas, memiliki pengertian bahwa kondisi kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang ideal diharapkan dapat tercukupi kenutuhan dasar yang meliputi aspek-aspek dalam kehidupan manusia yang semua aspek atau kondisi tersebut harus terpenuhi secara rata.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara atau *welfare of all*. Fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>31</sup>

Menurut Nasikun konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>31</sup> Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, At-Tibyan Journal of Qur'an and Hadis Studies, Vol 3, No. 1, Juni 2020

## 2.4 Teori Kesejahteraan Sosial

James Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *“a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met and social opportunities are maximized”*<sup>32</sup> yaitu (suatu kondisi dalam suatu masyarakat yang meliputi suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan).

Kesejahteraan sosial pada umumnya mencakup tiga aspek penting, yakni:

1. Kondisi kehidupan yang sejahtera ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial.
2. Institusi yaitu arena atau bidang kegiatan yang terkait yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas adalah suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.<sup>33</sup>

Maka dari pemaparan diatas, dapat dikatakan kesejahteraan sosial adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manusia agar dapat menciptakan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokok mampu terpenuhi yakni kebutuhan pangan, sandang dan papan. Seseorang juga dikatakan sejahtera apabila terbebas dari konflik atau kondisi

<sup>32</sup> James Midgley, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan* diterjemahkan oleh Fathruhsyah, (Jakarta: Bina Rena Pariwara,1995) Hlm. 23

<sup>33</sup> Asyhabuddin, “Welfare Society dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia”. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, Vol.2, No.2, Juni 2021, hlm 31-39

tertentu yang dapat menghalanginya menjalani kehidupan sehari-hari secara bebas. Kemudian, seseorang bisa dikatakan sejahtera apabila seseorang memiliki peluang untuk maju dan mendapatkan persamaan perlakuan dan peluang.

Pengertian diatas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Berarti dengan kata lain kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial serta terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan usaha sosial yang terorganisir yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Mencakup pula unsur kebijakan dan pelayanan didalamnya yang dalam arti luas terkait dengan berbagai kehidupan

dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan, budaya, rekreasi dan sebagainya.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Azrat Lamber dkk. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Ilmiah Society*, Vol.2, No.3, 2022.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan dan data resmi dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Menurut Creswell pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang mengamati suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Hal yang digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif yaitu membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>35</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor dalam tulisan Bagong dan Sutinah yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan, sikap dan teks, dan gambar, sehingga digunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang dilakukan pada saat penelitian.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan data dan fakta menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan menggambarkan

---

<sup>35</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. (Yogyakarta: Press, 2020), hlm.19.

<sup>36</sup> Bangong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), Hlm. 166-172

hasil analisa data yang didapatkan dari informan penelitian yang memahami permasalahan dan berhubungan dengan dampak program bantuan rehab rumah Baitul Mal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pembatasan masalah dalam sebuah penelitian kualitatif. Dengan fokus penelitian guna memudahkannya untuk memilah antara data yang diperlukan dan tidak diperlukan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan berfokus pada bagaimana dampak dari program bantuan rehab rumah bagi masyarakat dan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut serta kendala yang terjadi dalam proses penyaluran program bantuan rehab rumah.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Sementara itu ketergantungan geografis dan efektif seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan peninjauan dalam penentuan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten Aceh Selatan yaitu di Baitul Mal Aceh Selatan yang beralamat di Jalan A.Yani Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan

---

<sup>37</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (penerbitan:Surakarta, 2014), Hlm. 74.

untuk mengetahui langsung dampak dari program bantuan rehab rumah bagi para penerima bantuan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Nufian asal mula data adalah tema atau pokok darimana data dapat diperoleh.<sup>38</sup> Menurut Suharsimi Arikunto data adalah hasil pencatatan dari peneliti, baik berupa fakta maupun angka.<sup>39</sup> Data merupakan kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta berguna untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan suatu keadaan. Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian tanpa melalui perantara, baik melalui individu atau kelompok. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian diantaranya pihak Baitul Mal, pemerintah gampong dan masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan program bantuan rehab rumah, dengan fokus pembahasan mengenai proses penyaluran bantuan, strategi dan kendala Baitul Mal

---

<sup>38</sup> Nufian S Febriani, *Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Universitas Brawijaya Press, 2018) Hlm. 50

<sup>39</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2011), Hlm.100

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.122

dalam menyalurkan bantuan dan dampak program bantuan rehab rumah untuk kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (sumber yang telah ada). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan yang berupa buku, jurnal maupun dalam bentuk laporan penelitian. Data sekunder sebagai data pelengkap berupa bukti laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau dokumenter.<sup>41</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian tentang bantuan rehab rumah untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

### 3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data. Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang ingin diteliti. Informan penelitian adalah sesuatu, baik itu dalam bentuk benda ataupun orang, lembaga, yang bersifat keadaannya diteliti. Pada penelitian ini dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono Teknik

---

<sup>41</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm.71

purposive sampling berarti pengambilan data dilakukan dengan tertentu supaya penentuan informan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan harapan penelitian.<sup>42</sup>

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petugas Baitul Mal yang berhubungan langsung dengan proses penyaluran bantuan mulai dari tahap pendataan hingga penyerahan bantuan ke masyarakat, serta pemerintah gampong dan masyarakat penerima bantuan rehab rumah.

Tabel 3.1 Informan Wawancara

No.	Informan	Jumlah
1.	Petugas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan	3
2.	Kabag Umum sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan	1
3.	Pemerintah Gampong (Keuchik Gampong Jambo Papeun)	1
4.	Masyarakat penerima bantuan	6
5.	Masyarakat yang bukan penerima bantuan	2

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

#### 3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.216

<sup>43</sup> Lisa Horizon, *Metodologi Penelitian Politik*. (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007) hlm. 150

wawancara yang mengacu pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun. Yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian ditanyakan ke informan yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada pengurus Baitul Mal terkait proses mekanisme penyaluran program bantuan rehab rumah kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan dan penulis juga mewawancarai para penerima bantuan rehab rumah di Kabupaten Aceh Selatan agar memperoleh data objektif mengenai dampak bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkaitan yang berhubungan langsung dengan penulisan.

### **3.6.2 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data telaah pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian.<sup>44</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan berupa catatan-catatan penting dari pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan foto yang didapatkan dari masyarakat penerima program bantuan rehab rumah.

---

<sup>44</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2004), hlm.71

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun dan mengkategorikan data serta mencari tema atau pola dengan memahami maknanya.<sup>45</sup> Analisa data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun Langkah-langkah dalam proses Teknik analisis data terdapat tiga komponen, diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data bearti merangkum informasi hal-hal pokok yang penting untuk dibahas atau yang diambil kesimpulannya. Reduksi data dilakukan dengan cara abstraksi atau merangkum hal-hal yang penting yang tetap berfokus pada penelitian. Proses reduksi data dilakukan secara terus menerus pada saat penelitian agar menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dilapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>45</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: NILACAKRA Publishing House, 2018), hlm. 74

Reduksi data bertujuan untuk mempermudah informasi yang didapat di lapangan yang tentunya merupakan data yang sangat rumit. Pengelompokan dan penyederhanaan data atau catatan-catatan yang dianggap sesuai dengan yang ingin diteliti akan di ambil, sementara data yang tidak sesuai dengan apa yang diteliti akan dibuang.<sup>46</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data harus jelas, terorganisir dan tersusun agar mudah dipahami. Hal ini dilakukan bertujuan karena data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya banyak berbentuk naratif, sehingga diperlukannya penyederhanaan tanpa mengurangi isi dari data tersebut. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan, peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan pada setiap pokok masalah.

## 3. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah akhir dalam proses analisis data adalah kesimpulan atau verifikasi. Pada tahapan ini semua informasi akan diverifikasi kebenarannya selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan memperhatikan makna yang terkandung di dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

---

<sup>46</sup> Syafrida H.S, *Metodologi Penelitian*, (Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 47-48



Setelah peneliti memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan sesuai tema penelitian di lapangan. Kemudian peneliti mengolahnya secara sistematis dan menganalisisnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian data-data tersebut diuraikan dan disusun untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada menggunakan pendekatan berpikir deduktif.<sup>47</sup>

Deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut akan diuraikan dampak program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dari penafsiran awal.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 72

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan

Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kecamatan Tapaktuan. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat, disahkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).<sup>48</sup>

Kabupaten Aceh Selatan berada pada koordinat antara 02° 23' 24" – 03° 44' 24" Lintang Utara dan 96° 57' 36" – 97° 56' 24" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas sebesar 4.173,82 Km<sup>2</sup> atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.

---

<sup>48</sup> Profil Kawasan Aceh Selatan. Diakses pada 14 November 2023 [dinas Kelautan dan Perikanan Aceh | Halaman Profil Kawasan Aceh Selatan \(Acehprov.Go.Id\)](https://dinas.kelautan.dan.perikanan.aceh.go.id/Halaman-Profil-Kawasan-Aceh-Selatan)

- c) Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Persebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
Trumon	6207	76.591,03	8
Trumon Timur	8710	12.350,23	71
Trumon Tengah	6836	28.534,27	24
Bakongan	5405	5.762,14	94
Bakongan Timur	6254	7.381,20	85
Kota Bahagia	7064	24.463,29	29
Kluet Selatan	14520	10.658,50	136
Kluet Timur	10709	44.902,95	24
Kluet Utara	25039	7.323,68	342
PasieRaja	18228	9.811,37	186
KluetTengah	7621	80.107,91	10
Tapak Tuan	23146	10.072,58	230
SamaDua	16153	11.290,66	143
Sawang	16141	18.937,61	85
Meukek	21149	46.506,18	45
Labuhan Haji	13495	5.482,51	246

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
Labuhan Haji Timur	10081	9.550,22	106
Labuhan Haji Barat	17872	7.656,10	233

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2021, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 234.630 jiwa penduduk dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) sebesar 100,62. Jumlah penduduk tersebut mengalami penambahan sebesar 0,95% dari tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2021 adalah sebesar 1,27%. Kabupaten Aceh Selatan memiliki kepadatan penduduk rendah yaitu 56 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>49</sup>

Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, baik dilaut maupun didaratan. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Aceh Selatan diantaranya: Bertani yaitu tanaman yang menjadi mata pencaharian adalah pala, kelapa sawit, kopi, pinang, kelapa, karet, nilam dan tanaman lainnya yang terbentang dari kecamatan trumon timur sampai labuhan haji barat. Mata pencaharian sebagai nelayan atau melaut yang tersebar dari kecamatan labuhan haji hingga bakongan. Masyarakat Aceh Selatan juga banyak berprofesi sebagai pedagang yang ada di tiap-tiap kecamatan. Selain tiga mata pencaharian di atas, ada

<sup>49</sup> Kabupaten aceh selatan dalam angka 2021. Diakses pada 15 November 2023 [Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

juga profesi pegawai pemerintahan dan sisanya berprofesi wirausaha dan lain sebagainya.

Berikut data tentang garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014–2021 menurut BPS.

Tabel 4.2 Data Kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan 2014-2021

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2014	285 301	28,40	12,79
2015	288 619	29,61	13,24
2016	304 466	30,68	13,48
2017	332 177	32,51	14,07
2018	351 288	32,82	14,01
2019	369 107	31,06	13,09
2020	405 786	30,91	12,87
2021	418 689	32,25	13,18

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa garis kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya dengan tingkat terendah yaitu tahun 2014 dan tingkatan tertinggi tahun 2021. Jumlah penduduk miskin (ribu) tertinggi pada tahun 2017 yaitu 32,51 dan terendah tahun 2014 berjumlah 28,40.

#### 4. 2 Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah dana. Baitul mal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpulan dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan amanat perundang-undangan, adanya Baitul Mal ini memiliki kaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan kepulauan Nias.

Khusus di Aceh, setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami tersebut muncul permasalahan-permasalahan dibidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dengan perkembangan politik negara Indonesia yang ditandai era reformasi, maka pola hubungan daerah dengan pemerintah pusat berubah dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi dengan bentuk ekonomi daerah seluas-luasnya yang lebih memberikan keuntungan dari daerah itu sendiri.

Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keuntungan dari otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan

syariat Islam di Aceh, dari Undang-Undang tersebut keluarlah peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Di dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan pembentukan badan Baitul Mal sebagai pengelola Zakat dan harta keagamaan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 125 tentang Pemerintah Aceh mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pasal tersebut memberikan kewenangan untuk Aceh dalam melaksanakan syariat islam yang meliputi Aqidah, syariah dan akhlak.<sup>50</sup>

#### **4.2.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 pasal 1 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 pasal 1 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Secara kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki tiga unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu, Dewan Pengawas, Badan Baitul Mal dan Sekretariat. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan yang sudah direncanakan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sejarah Baitul Mal. Diakses pada 15 November 2023 dari situs [Sejarah | Baitul Mal Aceh \(acehprov.go.id\)](#)

<sup>51</sup> Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Diakses pada 15 November 2023 [Provinsi Aceh \(acehprov.go.id\)](#)

Adapun landasan hukum penyusunan renstra Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

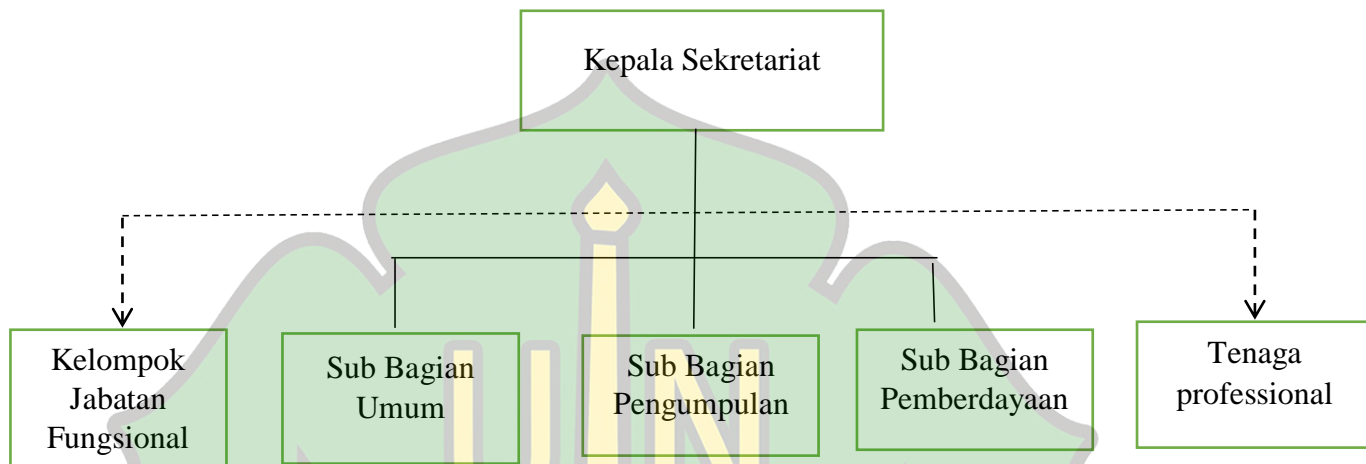
- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Selatan.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- d) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
- e) Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Pelaksanaan kegiatan Badan Baitul Mal tersebut didukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) provinsi Aceh,



dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kota.<sup>52</sup>

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

#### 4.2.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan fungsinya menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menjadikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah terdepan di provinsi Aceh.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada 15 November 2023 dari situs [perda No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat \(peraturan.go.id\)](http://perda.no.7.Tahun.2004.Tentang.Pengelolaan.Zakat.peraturan.go.id)

## 2. Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

- a. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan dan sosialisasi ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran Baitul Mal sebagai lembaga keuangan daerah.

### 4.2.3 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dibentuklah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Selatan. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi ke sekretariat dan fungsi menyusun program, memfasilitasi penyiapan program, memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan merupakan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Baitul Mal Kabupaten

Aceh Selatan. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintahan, maka rencana strategis Baitul Mal ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan oleh karena posisinya sebagai bagian dari perangkat daerah.

#### 4.2.4 Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Baitul Mal sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mengelola harta benda yang akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun memiliki kepentingan umum. Baitul Mal memiliki macam-macam program bantuan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menjalankan program-program yang mengacu kepada senif yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Sejauh ini, program yang ada pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan masih bersifat konsumtif. Berikut program-program Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang terbagi ke dalam beberapa senif yang langsung menyentuh kepada mustahik, diantaranya:

- a) Asnaf fakir/senif yaitu program santunan fakir miskin seumur hidup dan santunan disabilitas tuna netra.
- b) Senif miskin diantaranya program: (1) Bantuan biaya pendamping pasien berobat rujukan penyakit kronis untuk keluarga miskin, (2) santunan untuk anak yatim/piatu/yaitim piatu kurang mampu atau miskin di setiap gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, (3) bantuan untuk anak berkebutuhan khusus, (4) bantuan rehab rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin, (5) bantuan sanitasi MCK, (6) renovasi ringan rumah fakir miskin.

- c) Senif amil yaitu tidak ada program atau dana operasional.
- d) Senif muallaf yaitu bantuan pembinaan muallaf selama 1 tahun. Bantuan ini ditujukan bagi orang-orang yang baru saja memeluk agama islam, baik itu sendiri atau sudah berkeluarga dan berdomisili tetap di wilayah Aceh Selatan.
- e) Senif gharimin yaitu ditujukan kepada seseorang yang memiliki utang dan keterbatasan dalam melunasinya karena tidak memiliki harta yang cukup. Dikarenakan hal seperti ini jarang terjadi di Aceh Selatan. Maka programnya di alihkan ke bantuan tanggap bencana seperti kebakaran banjir bandang dan angin kencang dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
- f) Senif fisabillah yaitu: (1) program operasional rumah sederhana dan TPA, (2) bantuan biaya Pendidikan untuk siswa (TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA) yang kurang mampu dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Bentuk bantuan ada 2 yaitu berbentuk uang atau peralatan sekolah, (3) bantuan paket sekolah untuk siswa SD/MI, SMP yang kurang mampu, (4) bantuan reward hafidz al-qur'an kategori 5,10,20 dan 30 juz, (5) peningkatan kapasitas pengelola zakat atau semacam sosialisasi, (6) safari Ramadhan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan yakni sosialisasi di masjid mengenai zakat, (7) bantuan biaya Pendidikan dan perjalanan untuk mahasiswa kabupaten Aceh Selatan yang melanjutkan Pendidikan keluar negeri dan untuk hafidz di Lembaga tahfidz, (8) bantuan intensif Ramadhan yaitu untuk fisabilillah gampong (bantuan menjelang Ramadhan untuk khadam dan bilal).

### **4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **4.3.1 Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan**

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan dukungan dari stakeholder melalui pelaksanaan program pro rakyat telah berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi sebagai sebuah visi pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Salah satu visi tersebut adalah melalui program yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu program bantuan rehab rumah untuk masyarakat fakir miskin di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Fokus pembangunannya adalah membantu masyarakat fakir miskin untuk memperoleh rumah yang layak untuk ditempati.

Program bantuan rehab rumah merupakan sebuah program dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam membantu masyarakat fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan yaitu untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penyaluran dana zakat dalam program rehab rumah merupakan salah satu unsur dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat dalam program rehab rumah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Program bantuan rehab rumah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dari tahun 2013. Total rumah yang telah terbantu dalam program rehab rumah ini hingga tahun 2022 berjumlah 465 unit yang telah disalurkan untuk masyarakat kurang mampu di berbagai kecamatan di wilayah Aceh Selatan dengan tujuan untuk menyediakan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat yang

kurang mampu. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan program rehab rumah ini berasal dari dana infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Pada tahun 2022 sebanyak 58 unit rumah berhasil disalurkan bantuan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4.3 Daftar Penerima Bantuan Rehab Rumah Tahun 2022

No	Nama	Alamat Lengkap	Pekerjaan
1.	M. Akhir	Gampong Pantan Rubek, Kecamatan Labuhan Haji Barat	Buruh harian lepas
2.	Irwan Saputra	Gampong Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji Barat	Buruh harian lepas
3.	Rusmanidar. D	Gampong Kuta Iboh, Kecamatan Labuhan Haji Barat	Mengurus rumah tangga
4.	Rosnilawati	Gampong Pantan Rubek, Kecamatan Labuhan Haji Barat	Mengurus rumah tangga
5.	Ariadi	Gampong Hulu Pisang, Kecamatan Labuhan Haji	Tukang kayu
6.	Arjuna Zeri	Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji	Petani/pekebun
7.	Ruslan	Gampong Tengah Pisang, Kecamatan Labuhan Haji	Petani/pekebun
8.	Cut Mulia	Gampong Keumumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur	Petani/pekebun
9.	Ardin	Gampong Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur	Petani/pekebun
10.	Iskandar	Gampong Rot Tengoh, Kecamatan Meukek	Petani/pekebun
11.	Sudirman. AR	Gampong Buket Meuh, Kecamatan Meukek	Petani/pekebun

No	Nama	Alamat Lengkap	Pekerjaan
12.	Salmawati	Gampong Ladang Baro, Kecamatan Meukek	Mengurus rumah tangga
13.	Tgk. Dasri	Gampong Blang Gelinggang, Kecamatan Sawang	Petani/pekebun
14.	Basriadi Usman	Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang	Petani/pekebun
15.	Salihin	Gampong Salihin, Kecamatan Samadua	Buruh harian lepas
16.	Yusnidar	Gampong Kuta Blang, Kecamatan Samadua	Buruh harian lepas
17.	Raziati	Gampong Jilatang, Kecamatan Samadua	Mengurus rumah tangga
18.	Afrizal	Gampong Tampang, Kecamatan Samadua	Petani/pekebun
19.	Sugianto	Gampong Panton Luas, Kecamatan Samadua	Petani/pekebun
20.	Fifi Rahmah Lie Pantow	Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan	Mengurus rumah tangga
21.	Mulyadi	Gampong Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan	Wiraswasta/MRT
22.	Zulbaidah	Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan	Mengurus rumah tangga
23.	Misnan	Gampong Hulu, Kecamatan Tapaktuan	Tukang batu
24.	Sastra Sagala	Gampong Lhok Rukam, Kecamatan Tapaktuan	Petani/pekebun
25.	Abdullah Munir	Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan	Nelayan/perikanan

No	Nama	Alamat Lengkap	Pekerjaan
26.	Hendry Kusdiansyah	Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan	Karyawan honorer
27.	Asnawati	Gampong Ladang Tengoh, Kecamatan Pasie Raja	Mengurus rumah tangga
28.	Hasan Basri	Gampong Lhok Sialang Cut, Kecamatan Pasie Raja	Petani/pekebun
29.	Karim	Gampong Ie Mirah, Kecamatan Pasie Raja	Petani/pekebun
30.	Zulbaili	Gampong Krueng Kale, Kecamatan Pasie Raja	Petani/pekebun
31.	Zainuddin. J	Gampong Ie Mirah, Kecamatan Pasie Raja	Petani/pekebun
32.	Mansurdin	Gampong Pante Raja, Kecamatan Pasie Raja	Nelayan/perikanan
33.	Yuswar	Gampong Pucok Krueng, Kecamatan Pasie Raja	Petani/pekebun
34.	M. Alam Syah	Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara	Petani/pekebun
35.	Zulkifli	Gampong Gunong Pudung, Kecamatan Kluet Utara	Buruh tani
36.	Obah Bancin	Gampong Gunong Pudung, Kecamatan Kluet Utara	Buruh tani
37.	Hapan	Gampong Pulo Ie I, Kecamatan Kluet Utara	Petani
38.	Karmilawati	Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara	Mengurus rumah tangga
39.	Ramli	Gampong Pulo Air, Kecamatan Kluet Tengah	Tukang kayu



No	Nama	Alamat Lengkap	Pekerjaan
40.	Taidah	Gampong Jambo Papan, Kecamatan Kluet Tengah	Mengurus rumah tangga
41.	Darwati Yus	Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan	Mengurus rumah tangga
42.	Nardi	Gampong Inda Damai, Kecamatan Kluet Selatan	Petani/pekebun
43.	Masrita	Gampong Pasie Merapat, Kecamatan Kluet Selatan	Mengurus rumah tangga
44.	Salmidar	Gampong Pasie Merapat, Kecamatan Kluet Selatan	Mengurus rumah tangga
45.	Masniati	Gampong Kedai Kandang, Kecamatan Kluet Selatan	Mengurus rumah tangga
46.	Thaibah	Gampong Dapur, Kecamatan Kluet Timur	Mengurus rumah tangga
47.	Raidah	Gampong Buket Gadeng, Kecamatan Kota Bahagia	Mengurus rumah tangga
48.	Saifudin	Gampong Ujong Gunong Rayeuk, Kecamatan Kota Bahagia	Petani/pekebun
49.	Boidah	Gampong Seuneubok Keuranji, Kecamatan Kota Bahagia	Buruh tani
50.	Hermawati	Gampong Padang Beurahan, Kecamatan Bakongan	Mengurus rumah tangga
51.	Salman Abd	Gampong Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur	Nelayan/perikanan
52.	Nasir	Gampong Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon	Petani/pekebun
53.	Syahril Caniago	Gampong Keude Trumon, Kecamatan Trumon	Buruh tani

No	Nama	Alamat Lengkap	Pekerjaan
54.	Rusna	Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah	Mengurus rumah tangga
55.	Siti Hawa	Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah	Mengurus rumah tangga
56.	Anuar	Gampong Kapa Seusak, Kecamatan Trumon Timur	Petani/pekebun
57.	Aicah	Gampong Titi Poben, Kecamatan Trumon Timur	Mengurus rumah tangga
58.	Zul Fadli Bin M. Saleh	Gampong Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur	Buruh harian lepas

Sumber: Data Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan (2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Firdaus selaku tenaga professional mengatakan bahwa di Kabupaten Aceh Selatan mengenai program rehab rumah atau program bantuan rumah, ada juga dari instansi lain yang melaksanakan yang menjadi perbedaannya adalah dari instansi lain program ini dijalankan oleh pihak provinsi diantaranya dari PUPR, dinas Perkim dan dari aspirasi dewan melalui Perkim provinsi Aceh. Tentu terdapat perbedaan antara program rehab rumah yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dengan instansi lain dapat dilihat dari segi jumlah dana, juknis dan teknis. Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.25.000.000 – Rp.30.000.000 per unit rumah. Sedangkan dari dinas atau instansi lain dana yang dikeluarkan Rp.15.000.000-Rp.17.000.000 dan tidak rutin tiap tahun. Program rehab rumah yang dijalankan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dananya berasal dari zakat dan infaq. Sedangkan instansi lain dana berasal dari APBD atau sumber

lainnya. Teknis dan juknis pasti berbeda menurut ketentuan masing-masing instansi.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program rehab rumah selain yang dijalankan oleh Baitul Mal juga terdapat instansi lain yang menjalankan yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (PERKIM) serta dari aspirasi DPRA yang disalurkan melalui Dinas Perkim Aceh. Walaupun program tersebut dijalankan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh rumah yang layak huni dan sehat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar papan. Terdapat juga perbedaan dari segi jumlah dana, juknis dan teknis tergantung ketentuan masing-masing instansi.

#### **4.3.2 Proses Perencanaan Program Bantuan Rehab Rumah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan**

Dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya pada sektor pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, maka sesuai dengan hirarki setiap instansi/unit/SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dari suatu program telah dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing pihak atau lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Firdaus selaku tenaga profesional Baitul Mal

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Firdaus selaku tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 November 2023

Kabupaten Aceh Selatan pada proses perencanaan program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ada beberapa langkah yang diambil dalam merencanakan dan merealisasikan program tersebut, diantaranya:

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahap paling awal yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan program bantuan rehab rumah. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Baitul Mal menyelenggarakan program rehab rumah dengan sasaran adalah masyarakat fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Program ini dijalankan dengan tujuan terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pada tahap persiapan program rehab rumah yang pertama dilakukan adalah membentuk tim panitia pelaksana yaitu tim pengarah yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dan DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, tim pelaksana yaitu Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari tim pendataan, pendistribusian dan pengawasan dan tim pelaksana pada tingkat kecamatan (camat) dan gampong (keuchik).

### **2. Tahap Perencanaan**

Pada tahap ini akan membahas sejauh mana proses perencanaan dalam menjalankan program bantuan rehab rumah. Terdapat 2 tahapan, yaitu:

### **a. Proses Penetapan Penerima Bantuan**

Pada tahap ini, pihak Baitul Mal menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan rehab rumah dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pendataan dan verifikasi data mulai dari permintaan data melalui pihak kecamatan (camat) dan diteruskan ke gampong dalam kecamatan tersebut melalui keuchik dan mencari penerima sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Berikut merupakan kriteria penerima bantuan rehab rumah:

1. Penerima manfaat program bantuan rehab rumah yaitu masyarakat yang tergolong fakir atau miskin dan diutamakan kepala keluarga berumur minimal 40 tahun.
2. Memiliki KTP dan KK yang berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan.
3. Mustahik zakat dari golongan fakir miskin yang berpenghasilan Rp.2.000.000/bulan atau 50% dari UMP (Rp. 1.500.000/bulan )
4. Tidak mempunyai pekerjaan tetap.
5. Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim.
6. Bukan perangkat gampong atau keluarga dari perangkat gampong dan keluarga ASN yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.

Adapun kriteria rumahnya sebagai berikut: (1) Rumah yang akan direhab adalah milik pribadi dengan status tanah tidak dalam sengketa. (2) Rumah calon mustahik belum didata oleh pihak atau instansi lain dan belum pernah menerima bantuan rehab/bangun rumah dari instansi lain. (3) Rumah telah ditempati selama 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari keuchik. (4) Rumah tidak

permanen atau rusak, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai dari tanah/semen dalam keadaan rusak. (5) Rumah tidak memiliki fasilitas MCK. Apabila sudah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku, maka masyarakat boleh mengajukan proposal. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Firdaus selaku tenaga profesional dalam wawancaranya:

*“apabila sudah sesuai dengan kriteria, maka proses pengajuan proposal ada 2 cara pendaftaran, yaitu pendaftaran dari kecamatan nanti kecamatan memberitahukan kepada keuchik di tiap-tiap Gampong dan pengajuan pribadi dengan menyerahkan langsung kelengkapan administrasi ke pihak Baitul Mal. Apabila memenuhi kriteria boleh siapa saja mengajukan proposal”.*<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa untuk proses pengajuan proposal ada dua cara yaitu: menyerahkan proposal ke keuchik, lalu keuchik mengumpulkan berkas proposal calon penerima bantuan ke kecamatan dan kecamatan menyerahkan ke Baitul Mal. Sedangkan cara yang kedua adalah para pengaju proposal langsung menyerahkan berkas ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

#### **b. Proses Penyaluran Dana Anggaran**

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan kabag umum Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan penulis dapat menyimpulkan bahwa dana yang diperoleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan program bantuan rehab rumah berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan membuat rencana pengelolaan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Firdaus selaku tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 November 2023

dan alokasi dana yang jelas. Anggaran untuk program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah ditentukan dari perencanaan yang dituangkan dalam RKA dan Renstra Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan diinput dalam sistem SIPD daerah.

Dana APBK yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Baitul Mal untuk menunjang penyaluran dana ZIS. Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) Kabupaten berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten dan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan syariat islam.

Wawancara dengan bapak Firdaus selaku tenaga professional:

*“Jika sudah bisa dijalankan program rehab rumah tersebut maka pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan membuat pengajuan pencairan anggarannya ke Pemerintah Daerah. Kemudian DPRK mengesahkan anggaran daerah. Pada saat program telah ditetapkan dalam proses pencairan anggaran kendalanya tidak terlalu rumit hanya proses sistem yang perlu menunggu waktu saja, selebihnya tidak ada kendala.”<sup>55</sup>*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada proses pencairan anggaran tidak mengalami kendala yang rumit, hanya mengikuti verifikasi sistem saja. Program rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan sejak 2013 sampai sekarang. Tentunya dari segi dana yang dikeluarkan untuk per unit rumah pertahunnya berbeda-beda tergantung dari harga kebutuhan bahan material dan juga anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Firdaus selaku tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 November 2023

Tabel 4.4 Rencana dan Realisasi Pembangunan Program Bantuan Rehab Rumah

No.	Jumlah Rencana	Tahun	Jumlah Realisasi	Sumber Dana
1.	Rp. 2.160.000.000,-	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominal bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 58 unit dengan nominal Rp. 30.000.000,-/unit.</li> <li>Nominal bantuan renovasi ringan Rp. 10.000.000,-/unit.</li> <li>Bantuan sanitasi MCK dengan nominal Rp. 10.000.000,-/unit</li> </ul>	Dana ZIS 2022

Sumber: Data Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022.<sup>56</sup>

### 3. Tahap Pelaksanaan Rencana

#### a. Tahap Pelaksanaan Program

Setelah berkas proposal dikumpulkan, pihak Baitul Mal akan memverifikasi kembali setiap data yang telah dikumpulkan dan mensurvey ke lapangan untuk melihat langsung keadaan yang sebenarnya serta menyaring lagi kepada siapa bantuan tersebut layak diberikan dan memang untuk yang benar-benar sangat membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reza Mulyani (tenaga profesional) menjelaskan:

*“Pada saat memverifikasi ke lapangan dengan mendatangi rumah yang telah dicantumkan sesuai alamat. Pihak kami selain melihat kondisi fisik*

<sup>56</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Melalui Baitul Mal Menyerahkan Bantuan Rehab Rumah dan Fasilitas MCK kepada Mustahik, Diakses pada 28 Mei 2023 ([acehselatankab.go.id](http://acehselatankab.go.id))



*rumah, kami juga harus melihat dari segi kondisi ekonomi dan asset yang dimiliki. Karena hal ini pernah terjadi pada saat pengecekan ke lapangan, dilihat dari kondisi rumah memang layak untuk mendapatkan bantuan. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata calon penerima memiliki lahan kelapa sawit yang tergolong luas dan dikategorikan orang yang mampu. Maka dengan berat hati, pihak Baitul mal memutuskan untuk tidak memberikan bantuan tersebut.”<sup>57</sup>*

Wawancara dengan ibu Cut Fitrah (tenaga profesional) mengatakan:

*“Adapun golongan yang berhak menerima bantuan rehab rumah adalah senif fakir, senif miskin dan senif fisabilillah yang layak menerima bantuan adalah janda yang menanggung anak yatim. Prioritas yang berhak mendapatkan bantuan dengan kondisi rumah adalah semi permanen atau dinding rumah dari papan”.<sup>58</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal harus benar-benar teliti dalam memilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan rehab rumah. Selain melihat kondisi fisik rumah, tim dari Baitul Mal juga melihat dari segi kondisi sosial dan ekonomi keluarga dari calon penerima bantuan serta aset yang dimiliki. Salah satu hal terpenting dalam pemberian bantuan rumah adalah memiliki aturan yang jelas agar tidak terjadi perselisihan dalam kalangan masyarakat dikemudian hari. Setelah menetapkan siapa yang berhak menerima program bantuan tersebut barulah dilakukan penyaluran program bantuan rehab rumah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

#### **b. Tahap Pengawasan**

Tahap pengawasan dilakukan agar program yang dijalankan tidak terjadi penyimpangan dan dilakukan pengawasan yang ketat. Dalam program rehab rumah

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan ibu Reza Mulyani selaku tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 November 2023

<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Cut Fitrah selaku tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 November 2023

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada saat pengerjaan melakukan pengawasan secara berkelanjutan yaitu sebanyak tiga kali dan didampingi oleh pihak Bappeda Kabupaten Aceh Selatan sebagai pengawasan pelaksanaan.

Pengawasan program bantuan rehab rumah yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal dan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan memang diperlukan terutama untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hasil tindakan atau perbaikan bagaimanapun menjadi umpan balik bagi perencanaan.

#### **4.3.3 Kendala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam Menyalurkan Program Bantuan Rehab Rumah**

Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami kendala-kendala dalam menjalankan program bantuan rehab rumah. Hasil wawancara yang penulis lakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dengan tenaga profesional dan juga wawancara dengan masyarakat, penulis dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang menjadi penghambat atau kendala secara politis dalam penyaluran bantuan rehab rumah yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya:

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki database rumah-rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Aceh Selatan. Ini masih menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan rehab rumah karena dari pihak Baitul Mal belum memiliki data rumah tidak layak huni di wilayah Aceh Selatan.

2. Pembagian bantuan yang tidak merata yakni bantuan yang dialokasikan tidak merata disetiap gampong yang ada disuatu kecamatan. Ini disebabkan adanya pertimbangan politik yaitu para pemangku jabatan menginginkan di daerahnya bantuan harus dialokasikan bukan atas dasar kebutuhan sebenarnya. Sehingga ini dapat memicu kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.
3. Adanya nepotisme dan klientelisme yaitu dalam proses penyaluran program bantuan rehab rumah memainkan peran kepentingan politik. Para penerima bantuan dapat dipilih berdasarkan hubungan politik atau dukungan politik yang diberikan.
4. Tidak melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses penyaluran program bantuan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi konflik politik. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat ada juga faktor kerabat dekat yang ada hubungan dengan pihak Baitul Mal yang mendapatkan bantuan
5. Perubahan kebijakan yaitu adanya perubahan regulasi pada disahkannya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi pembangunan fisik, pihak Baitul Mal hanya memberikan bantuan berupa uang. Namun pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tetap menjalankan program rehab rumah, dengan menyalurkan bantuan bersifat swakelola oleh kepala keluarga penerima bantuan. Hanya saja mengalami keterlambatan dalam proses penyaluran sehingga memerlukan penambahan waktu dari yang telah ditentukan.

#### 4.3.4 Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan

Kehadiran Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Telah banyak program-program penyaluran zakat yang pro rakyat yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Keberhasilan penyaluran program-program tersebut juga tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain. Program bantuan rehab rumah mempunyai tujuan agar masyarakat kurang mampu dan memiliki penghasilan rendah bisa memiliki rumah yang layak huni dengan bantuan yang diberikan. Harapan dari program bantuan rehab rumah adalah supaya masyarakat memiliki motivasi untuk mempunyai hunian yang layak dengan lingkungan rumah yang sehat. Tentunya dampak dari program bantuan rehab rumah ini tidak hanya dilihat dari perubahan fisik rumah penerima bantuan. Dalam penelitian ini, dampak juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat penerima bantuan serta masyarakat di lingkungan sekitar yang dilihat secara politis.

Wawancara dengan bapak Firdaus (tenaga profesional) mengatakan:

*“Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki beberapa tujuan dari bantuan penyaluran program bantuan rehab rumah yang ingin dicapai diantaranya yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan tempat tinggal yang layak huni dan sehat, memperkecil perbedaan antara masyarakat miskin dengan masyarakat menengah ke atas sehingga tidak adanya rasa minder atau kurang percaya diri, meningkatkan rasa kepercayaan muzakki dengan tercapainya maksud dari zakat itu sendiri yang betul-betul disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, serta membangun citra baik Baitul Mal itu sendiri”.*<sup>59</sup>

Maka dari pemaparan diatas dapat disimpulkan yaitu program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dengan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Firdaus selaku tenaga profesional Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 8 November 2023

memberikan tempat tinggal yang layak huni. Memberikan rasa aman dan percaya diri tanpa ada adanya perbedaan antara masyarakat miskin dengan masyarakat menengah serta untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Keuchik Gampong Jambo Papeun, yang mana masyarakat Gampong Jambo Papeun yang kurang mampu sudah banyak terbantu dengan adanya bantuan rehab rumah ini. Berdasarkan wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Jambo Papeun mengemukakan bahwa:

*“Dengan adanya program bantuan rehab rumah ini sangat terbantu bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak. Program rehab rumah membawa manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Disamping itu, masyarakat sekitar juga ikut membantu pada saat pengerjaan rumah, mereka bergotong royong membantu sesamanya. Dapat dilihat juga pada tingkat partisipasi masyarakat meningkat”*.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan membantu masyarakat dalam pemenuhan rumah yang layak huni dengan mekanisme dan sistem yang berlaku. Ini sangat memberikan sikap positif bagi masyarakat terhadap kebijakan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Pelaksanaannya di samping berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan yang menciptakan kesejahteraan, juga terdapat nilai ibadah di dalamnya. Melalui program bantuan rehab rumah ini, diharapkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu mempunyai tempat hunian yang layak untuk dirinya dan anggota keluarganya. Dampak positif juga dirasakan oleh

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak Umar selaku Keuchik Gampong Jambo Papeun pada tanggal 9 November 2023

masyarakat sekitar yang bukan penerima bantuan, Dimana masyarakat ikut serta membantu dan saling gotong royong dalam pengerjaan rehab rumah.

Berikut wawancara penulis dengan masyarakat penerima bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk mengetahui dampak kesejahteraan masyarakat bagi penerima bantuan. Wawancara dengan bapak Tarziman (mustahik) mengatakan:

*“Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan mendapatkan program bantuan rehab rumah ini pada tahun 2021. Saya merasa puas dan nyaman setelah rumah di rehab sekarang kondisi rumah sudah layak dan nyaman ditempati untuk saya dan keluarga. Saya harap program ini terus berjalan setiap tahunnya agar bisa membantu masyarakat lain yang membutuhkan”.*<sup>61</sup>

Wawancara dengan Ibu Herlinda (mustahik) mengatakan:

*“Alhamdulillah saya merasa senang karena pihak Baitul Mal menerima berkas persyaratan yang saya serahkan. sekarang rumah yang saya tempati merasa aman dan nyaman, yang dulunya masih ber dinding kayu, sekarang sudah menggunakan bata berplester dan lengkap dengan fasilitas yang memadai seperti penyediaan MCK dibandingkan dulu rumah yang kami tempati tidak mempunyai MCK, terimakasih banyak kepada pihak Baitul Mal atas perhatian kepada masyarakat fakir miskin seperti kami yang sangat membutuhkan rumah yang layak huni.”*<sup>62</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yulidar mengatakan:

*“Syukur Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sangat terbantu, dikarenakan rumah sebelumnya ditempati dindingnya sudah banyak yang bolong dimakan rayap dan lampu penerangannya juga kurang untuk anak kami belajar di malam hari.”*<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Salmawati mengatakan:

*“Alhamdulillah, berkat bantuan ini kami memiliki rumah yang layak huni, sangat terbantu dengan adanya bantuan ini karena saya hanya bekerja mengurus rumah tangga yang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit. Sebelum mendapat bantuan, kondisi rumah bagian dapur masih*

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Tarziman (mustahik) pada tanggal 4 November 2023

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Herlinda (mustahik) pada tanggal 3 November 2023

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Yulidar (mustahik) pada tanggal 2 November 2023

*beralas tanah dan juga terdapat beberapa bagian yang bocor. Sekarang kami sudah memiliki rumah yang nyaman untuk ditempati.*<sup>64</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar (mustahik) mengatakan:

*“Semenjak adanya bantuan beban pikiran saya sebagai tulang punggung keluarga menjadi berkurang sebab rumah saya sebelumnya banyak yang harus diperbaiki seperti atap yang bocor hampir setiap kali musim hujan, untuk sekarang saya bisa fokus untuk kebutuhan sehari-hari kami sekeluarga tanpa harus memikirkan pengeluaran perbaikan rumah. dan juga bisa memikirkan biaya pendidikan anak yang masih sekolah”.*<sup>65</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul (bukan penerima bantuan) mengatakan:

*“Kami merasa ikut senang, saudara kami mendapatkan bantuan ini. Apa yang bisa kami bantu, Insya Allah kami usahakan seperti memberikan tenaga kami selama pengerjaan rumah”.*<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat penerima bantuan. Maka dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel mengenai dampak yang dirasakan masyarakat penerima bantuan rehab rumah dan masyarakat sekitar yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan politik.

Tabel 4.5 Analisis Dampak Program Rehab Rumah Terhadap Penerima Bantuan

No.	Dampak	Penjelasan
1.	Peningkatan kemandirian ekonomi	Melalui program rehab rumah, pemilik rumah dapat merasa lebih memicu rasa tanggung jawab dan kemandirian ekonomi karena mereka lebih mungkin merawat dan memelihara rumah mereka.

<sup>64</sup> Wawancara dengan ibu Salmawati (mustahik) pada tanggal 3 November 2023

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Iskandar (mustahik) pada tanggal 4 November 2023

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Samsul (Masyarakat sekitar) pada tanggal 4 november 2023

No.	Dampak	Penjelasan
2.	Ketahanan dan stabilitas	Memiliki rumah layak huni memberikan rasa stabilitas dalam kehidupan seseorang yang dapat membantu mengurangi tingkat stress dan kekhawatiran terkait ketidakpastian tempat tinggal.
3.	Lapangan pekerjaan	Berdasarkan wawancara yang dilakukan program bantuan rehab rumah memberikan manfaat pada terciptanya lapangan kerja selama proses pengerjaan rumah. Manfaat yang dirasakan yaitu memberikan peluang pekerjaan kepada pekerja bangunan, toko bahan bangunan, orang yang terlibat dalam penjualan bahan material bangunan seperti pengrajin kayu, usaha penyedia batu dan pasir dan pihak-pihak lainnya.
4.	Interaksi sosial	Hasil menunjukkan bahwa program bantuan rehab rumah memiliki dampak yang signifikan yaitu terjalinnya hubungan positif diantara masyarakat penerima bantuan dengan orang-orang sekitarnya yang bukan penerima bantuan rehab rumah. Selama pelaksanaan program terdapat interaksi sosial yang positif antara masyarakat. Masyarakat disekitar lingkungan tersebut ikut berpartisipasi dan membantu



No.	Dampak	Penjelasan
		dalam pelaksanaan pembangunan rumah yang tentunya terbentuknya interaksi sosial yang positif
5.	Partisipasi Masyarakat	Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat menunjukkan bahwa selama proses pelaksanaan program bantuan rehab rumah memiliki dampak positif pada partisipasi masyarakat. Ini terlihat dari masyarakat sekitar yang bukan penerima bantuan turut membantu selama proses pembangunan rumah. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi dan memiliki rasa gotong royong untuk membantu sesama dengan memberikan tenaga dan materi. Hal ini memberikan dampak positif tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program bantuan rehab rumah.
6.	Mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah	Dampak dari program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan juga berpengaruh pada keikutsertaan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah seperti ikut serta dalam Musrenbang baik itu tingkat gampong maupun kecamatan.
7.	Mengurangi konflik	Dengan adanya program bantuan rehab rumah dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan menyeimbangkan kestabilan bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin muncul karena kondisi perumahan yang buruk.

No.	Dampak	Penjelasan
8.	Pemberdayaan masyarakat	Program rehab rumah seringkali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Ini dapat memberdayakan masyarakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam meningkatkan kondisi lingkungan mereka. Pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi konflik karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan mereka.
9.	Keadilan sosial	Program bantuan rehab rumah dapat membantu mengurangi kesenjangan perumahan antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah mereka, program ini dapat menciptakan akses yang lebih merata terhadap perumahan yang layak huni.
10.	Peningkatan solidaritas sosial	Melalui program bantuan rehab rumah, masyarakat dapat mengembangkan rasa solidaritas sosial. Tentunya solidaritas dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan kerjasama dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil analisis dampak program rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Program bantuan rehab rumah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berdampak positif bagi masyarakat yang menerima bantuan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program bantuan rehab rumah ini membantu dalam mengentaskan kemiskinan sehingga terciptanya kesejahteraan pada masyarakat.

Program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan bisa dibidang cukup berhasil, terbukti dengan sudah berjalannya program bantuan rehab rumah sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 telah menyalurkan bantuan sebanyak 465 unit. Dalam menerapkan persyaratan dan kriteria penerima bantuan tergolong mudah dan tidak dipungut biaya apapun sehingga mempermudah masyarakat dalam melengkapi persyaratan tersebut.

Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan menghasilkan jawaban bahwa peran program bantuan rehab rumah dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Diharapkan program ini tetap berjalan lancar dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pemenuhan rumah yang layak huni.

Program bantuan rehab rumah memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima bantuan. Dampak yang dirasakan masyarakat sebagai penerima bantuan merasa bahagia dan puas dengan adanya pemberian program rehab rumah. Program ini memberikan manfaat dan pengaruh besar bagi penerima

bantuan dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Menciptakan rasa aman dan nyaman dengan kondisi tempat tinggal yang baru.

Dengan adanya program bantuan sosial sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya sehingga akan fokus ke pemenuhan kebutuhan dasar yang lainnya. Sedikit banyaknya program bantuan rehab rumah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program rehab rumah dapat mengentaskan kemiskinan dengan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kesehatan dalam mengatasi perumahan kumuh dan tidak layak huni. Disamping itu, dampak positif juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan rasa solidaritas, kepedulian, meningkatkan partisipasi Masyarakat, dapat mengurangi konflik dan lain sebagainya.

Dampak negatif yang muncul adalah rentan terjadinya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi ketika tidak meratanya pembagian penerima bantuan di tiap-tiap gampong di suatu kecamatan. Namun, dari pihak Baitul Mal melakukan inisiatif apabila suatu gampong telah mendapatkan bantuan, maka untuk pembagian program di tahun depan diberikan ke gampong yang belum menerima yang masih satu kecamatan agar pembagian program bantuan merata dan menghindari kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis dampak program bantuan rehab rumah Baitul Mal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pada Proses Perencanaan Program Bantuan Rehab Rumah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang pertama dilakukan adalah (1) Tahap persiapan adalah tahap awal yang dilakukan dengan membentuk tim panitia pelaksana yaitu tim pengarah yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dan DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, tim pelaksana yaitu Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari tim pendataan, pendistribusian, pengawasan dan tim pelaksana pada tingkat kecamatan (camat) dan gampong (keuchik). (2) Tahap perencanaan yang meliputi 2 tahapan, pertama proses penetapan penerima bantuan yaitu sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang dicantumkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, kedua proses penyaluran dana anggaran adalah dana yang diperoleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan program bantuan rehab rumah berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Anggaran untuk program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sudah ditentukan dari perencanaan yang dituangkan dalam RKA dan Renstra Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dan diinput dalam sistem SIPD daerah. APBK yang diberikan pemerintah daerah melalui sekretariat Baitul

Mal Kabupaten untuk menunjang penyaluran dana ZIS. (3) Tahap Pelaksanaan Rencana meliputi 2 tahap yaitu tahap pelaksanaan program adalah setelah pihak Baitul mal melakukan survey lapangan dan telah menetapkan penerima bantuan yang sudah sesuai kriteria dan persyaratan maka proses penyaluran bantuan akan dilakukan. Kedua, tahap pengawasan dilakukan agar program yang dijalankan tidak terjadi penyimpangan dan dilakukan pengawasan yang ketat. Dalam program rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada saat pengerjaan melakukan pengawasan secara berkelanjutan yaitu sebanyak tiga kali dan didampingi oleh pihak Bappeda Kabupaten Aceh Selatan sebagai pengawasan pelaksanaan.

2. Selama proses perencanaan dan penyaluran program bantuan rehab rumah juga mengalami kendala, diantaranya: (1) Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki database rumah-rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Aceh Selatan yang menyebabkan kendala dalam proses penyaluran bantuan. (2) Pembagian bantuan yang tidak merata disetiap gampong yang ada disuatu kecamatan. Ini disebabkan adanya pertimbangan politik yaitu para pemangku jabatan menginginkan di daerahnya bantuan harus dialokasikan bukan atas dasar kebutuhan sebenarnya. Sehingga ini memicu kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. (3) Adanya nepotisme dan klientelisme yaitu dalam proses penyaluran program bantuan rehab rumah memainkan peran kepentingan politik. Hasil wawancara dengan masyarakat ada juga faktor kerabat dekat yang ada hubungan dengan pihak Baitul Mal yang mendapatkan bantuan (4) Tidak melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses penyaluran program bantuan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi konflik politik. (5) Perubahan kebijakan yaitu adanya

perubahan regulasi pada disahkannya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi pembangunan fisik, pihak Baitul Mal hanya memberikan bantuan berupa uang. Namun pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tetap menjalankan program rehab rumah, dengan menyalurkan bantuan bersifat swakelola oleh kepala keluarga penerima bantuan. Hanya saja mengalami keterlambatan dalam proses penyaluran sehingga memerlukan penambahan waktu dari yang telah ditentukan.

3. Dampak program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah program rehab rumah membawa dampak positif yang signifikan karena membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi rumah yang layak huni. Dampak yang dilihat tidak hanya dari perubahan fisik rumah penerima bantuan, akan tetapi mempengaruhi aspek lain yaitu tidak hanya bagi masyarakat penerima bantuan tetapi juga masyarakat disekitar lingkungan tersebut. Dampak yang dirasakan diantaranya: Peningkatan kemandirian ekonomi, ketahanan dan stabilitas, adanya lapangan pekerjaan, interaksi sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengurangi konflik, pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial dan peningkatan solidaritas sosial. Dengan adanya program bantuan rehab rumah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya sehingga akan fokus ke pemenuhan kebutuhan dasar yang lainnya. Sedikit banyaknya program bantuan rehab rumah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program rehab rumah dapat mengentaskan kemiskinan dengan mensejahterakan masyarakat serta

meningkatkan kesehatan dalam mengatasi perumahan kumuh dan tidak layak huni. Dampak negatif yang muncul adalah rentan terjadinya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi ketika tidak meratanya pembagian penerima bantuan di tiap-tiap gampong di suatu kecamatan. Namun, dari pihak Baitul Mal melakukan inisiatif apabila suatu gampong telah mendapatkan bantuan, maka untuk pembagian program di tahun depan diberikan ke gampong yang belum menerima yang masih satu kecamatan agar pembagian program bantuan merata dan menghindari kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Setiap program yang dijalankan oleh pemerintah atau instansi yang berperan sebagai lembaga penyalur program bantuan rehab rumah tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran untuk memperbaiki program tersebut agar dimasa yang akan datang program dapat dijalankan lebih maksimal. Sejauh ini, program rehab rumah yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam proses penyaluran sudah bagus. Saran dari penulis kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat menambah kuota penerima bantuan rehab rumah supaya lebih banyak masyarakat yang dapat terbantu dan merasakan dampak bantuan dengan adanya program ini. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sejauh mana dampak program bantuan rehab rumah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andre Bayo Ala. 2002. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoris Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*.
- Bangong, Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- BAPPENAS. 2003. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas TA-SRPP.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Eko Murdiyanto. 2020. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta: Press.
- Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.

- Heru Nugroho. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Irawan Soehartono. 2004. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakrya.
- James Midgley. 1995. *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan* diterjemahkan oleh Fathrulsyah. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- James Midgley. 2005. *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Departemen Agama RI.
- Nana Sudjana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nufian S Febriani. 2018. *Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Universitas Brawijaya Press.
- Lisa Horizon. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. FH UII Press: Yogyakarta
- Sri Edi Suwarsono. 2007. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta: Cendekiawan Tentang Islam UI Press.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Suharno dan Retnoningsih. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya

Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Syafrida H.S.2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit: KBM Indonesia.

Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: NILACAKRA Publishing House.

**Skripsi:**

Asriani. *Implementasi Program Bantuan Stimulant Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021

Rismaniar. *Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022

**Jurnal:**

Ali Imron. 2012. *Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jurnal Riptek Vol.6 No.1.

Amirus Sodiq. 2016. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. Equilibrium Vol.3 No.2.

Anis Niam Imana. 2019. *Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016*. Jurnal Al-Intaj Vol.5 No.2.

- Dahlia Sukmasari. 2020. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran*. *Jurnal of Qur'an and Hadis Studies* Vol.3 No.1
- Ending Pratiwi dkk. 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?* *Jurnal Konstitusi* Vol.2, No19
- Erwan Agus Purwanto. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada* Vol .10 No. 3.
- Herman. 2019. *Bestuurzorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Esensi Hukum* Vol.1 No.1
- Noor dan David. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*. *Jurnal Jibeka* Vol.11 No.2.
- Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. *Jurnal Sospol* Vol.2 No.1.
- Savira dan Putu. 2020. *Analisis Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rtm Di Kecamatan Karangasem*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.9 No.8.
- Tateki dan Trilaksmi. 2020. *Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol.44 No.1.
- Yulianto dan Kadji. 2013. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, *Artikel-Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo*

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Qanun Aceh No.3 Tahun 2021 Perubahan Atas Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

**Artikel/Website Resmi Pemerintah:**

*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkecamatan Tahun 2021 (Satuan Unit), Open Data Aceh Selatan, Diakses pada 10 Juni 2023* [Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan - Jumlah Rumah tidak layak huni perkecamatan tahun 2021 \(satuan unit\).csv - Open Data Aceh Selatan \(acehselatankab.go.id\)](#)

*Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Melalui Baitul Mal Menyerahkan Bantuan Rehab Rumah dan Fasilitas MCK kepada Mustahik, Diakses pada 28 Mei 2023* [Penyerahan Bantuan Rehab Rumah, Renovasi Ringan Dan Bantuan Fasilitas Mck Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan | Baitul Mal Aceh Selatan \(Acehselatankab.Go.Id\)](#) [جامعة الرانيري](#)

A R - R A N I R Y

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

##### Pertanyaan untuk Petugas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

1. Bagaimana awal dibentuknya program bantuan rehab rumah yang menjadi salah satu program Baitul Mal Aceh Selatan ?
2. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya program rehab rumah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ?
3. Apa saja kriteria yang ditetapkan kepada calon penerima bantuan?
4. Dalam menjalankan program rehab rumah pihak Baitul mal bekerjasama dengan pihak apa saja?
5. Selain dari Baitul Mal, setahu bapak/ibu adakah dari instansi lain yang menjalankan program yang sama di Kabupaten Aceh Selatan?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan rehab rumah?
7. Apakah program rehab rumah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?
8. Darimana sumber dana yang digunakan dalam program rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ?
9. Apa kendala selama proses pencairan anggaran?
10. Apakah bantuan yang diterima oleh penerima manfaat digunakan dengan tepat?
11. Adakah proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal selama proses pembanguana rehab rumah ?

12. Apakah terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat penerima bantuan dengan pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan ?
13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran program rehab rumah?
14. Apakah masyarakat penerima bantuan merasa puas dengan program rehab rumah Baitul Mal Aceh Selatan?
15. Program rehab rumah Baitul Mal Aceh Selatan apakah membawa pengaruh untuk masyarakat penerima bantuan?
16. Apakah pengaruh yang dirasakan masyarakat penerima manfaat dari program rehab rumah sesuai dengan harapan dibentuknya program?
17. Apakah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan punya acuan tersendiri mengenai kriteria rumah tidak layak huni?
18. Adakah sosialisasi yang dilakukan pihak Baitul mal mengenai program rehab rumah ini?
19. Menurut bapak/ibu apakah hasil dari program rehab rumah sesuai dengan harapan?
20. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kesejahteraan masyarakat?
21. Menurut bapak/ibu dampak seperti apa yang dirasakan masyarakat penerima manfaat?

**Pertanyaan untuk Kabag Umum Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan**

1. Apa yang bapak ketahui tentang program bantuan rehab rumah?

2. bagaimana tahapan pengalokasian anggaran pada program bantuan rehab rumah?

3. Apa ada kendala selama pengesahan anggaran?

### **Pertanyaan untuk Masyarakat Penerima Bantuan Rehab rumah**

1. Kapan bapak/ibu menerima program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja persyaratan yang bapak/ibu lengkapi dalam pengajuan proposal?
3. Berapa lama masa pengerjaan rehab rumah?
4. Apa kendala yang dihadapi selama pengerjaan rehab rumah?
5. Apa dampak yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan apabila dibandingkan sebelum menerima bantuan?
6. Apa program rehab rumah menurut bapak/ibu membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar?
7. Apa bapak/ibu merasa puas dengan program yang diberikan?
8. Dengan adanya program bantuan rehab rumah Baitul Mal kabupaten Aceh selatan mampu meningkatkan taraf kehidupan Bapak/ibu?
9. Siapa yang mencari tukang?
10. Apakah ada pengecekan dari pihak Baitul Mal selama proses pembangunan?
11. Apakah cukup dana yang diberikan untuk pengerjaan rehab rumah?

### **Pertanyaan untuk Keuchik Gampong Jambo Papeun**

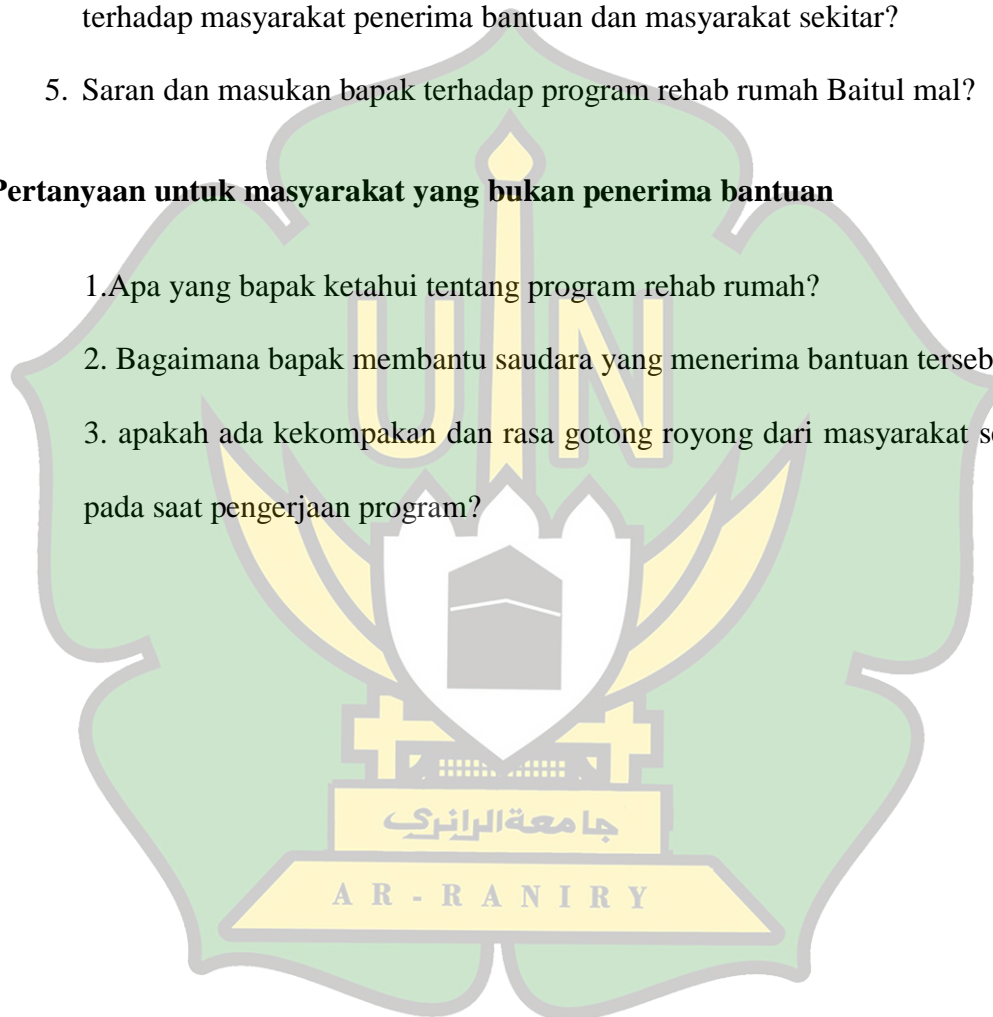
1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap program bantuan rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?



2. Apa saja keterlibatan bapak dalam proses penyaluran program rehab rumah?
3. Menurut bapak, apakah program rehab rumah memberi manfaat kepada penerima bantuan?
4. Bagaimana dampak yang bapak lihat dari adanya program rehab rumah terhadap masyarakat penerima bantuan dan masyarakat sekitar?
5. Saran dan masukan bapak terhadap program rehab rumah Baitul mal?

**Pertanyaan untuk masyarakat yang bukan penerima bantuan**

1. Apa yang bapak ketahui tentang program rehab rumah?
2. Bagaimana bapak membantu saudara yang menerima bantuan tersebut?
3. apakah ada kekompakan dan rasa gotong royong dari masyarakat sekitar pada saat pengerjaan program?



## Lampiran 2

### Dokumentasi Penyaluran Program Rehab Rumah Oleh Baitul Mal Kabupaten

#### Aceh Selatan

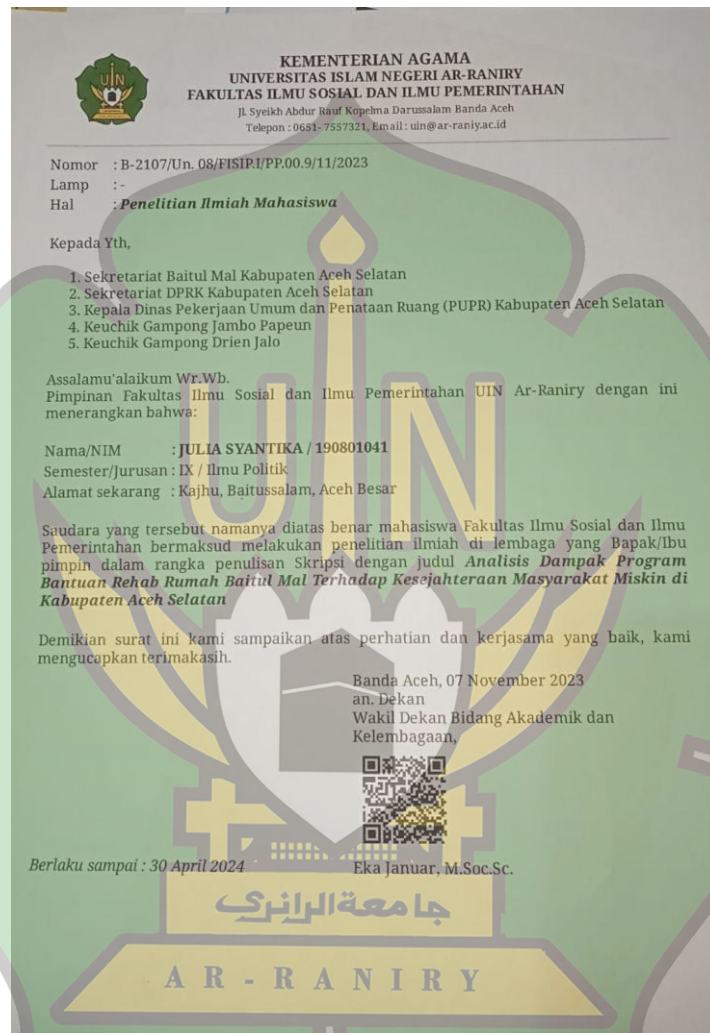


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 3

### Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2107/Un\_08/FISIPI/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan
2. Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan
4. Keuchik Gampong Jambo Papeun
5. Keuchik Gampong Drien Jalo


Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JULIA SYANTIKA / 190801041**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Politik  
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Dampak Program Bantuan Rehab Rumah Baitul Mal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

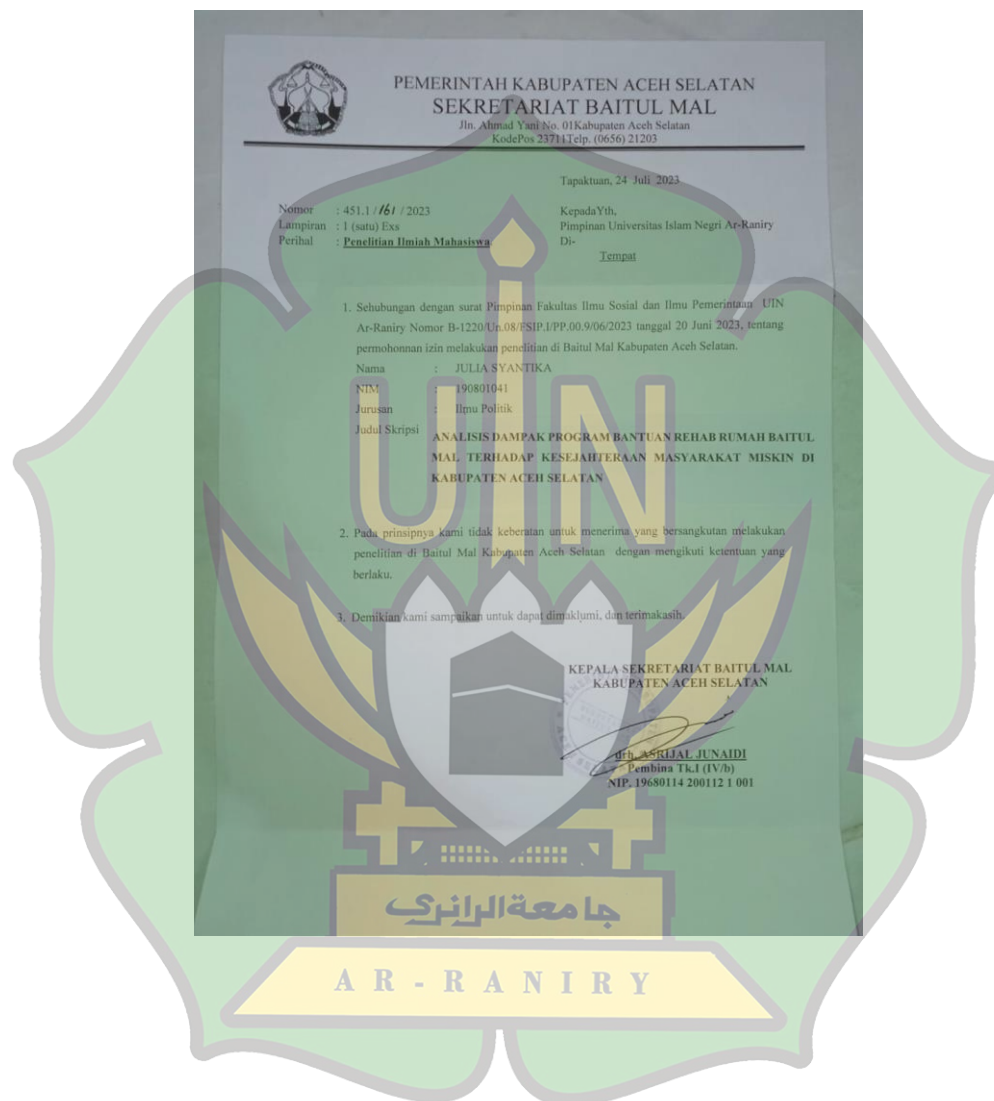
Banda Aceh, 07 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 April 2024 Eka Januar, M.Soc.Sc.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



### Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Kabag Umum Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Keuchik Gampong Jambo Papeun



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan